

KETAHANAN PANGAN — DAN — STABILITAS EKONOMI MAKRO INDONESIA



— Oleh: Rudy C Tarumingkeng —

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

29 March 2026

KETAHANAN PANGAN DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO INDONESIA

Abstrak

Ketahanan pangan memiliki posisi yang sangat penting dalam stabilitas ekonomi makro Indonesia. Dalam konteks pembangunan modern, pangan tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan sektor pertanian atau ketersediaan bahan makanan, melainkan sebagai fondasi bagi pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, kesehatan publik, produktivitas tenaga kerja, stabilitas fiskal, dan ketahanan sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi makro, definisi ini menunjukkan bahwa pangan merupakan variabel strategis yang memengaruhi sisi penawaran, sisi permintaan, distribusi pendapatan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Di tingkat global, tekanan pangan tetap tinggi. FAO melaporkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan sekitar 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. Sementara itu, inflasi pangan global sejak 2020 secara konsisten melampaui inflasi umum dan sempat

mencapai 13,6 persen pada Januari 2023. Situasi ini menegaskan bahwa pangan merupakan sumber kerentanan makroekonomi di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut hadir bersamaan dengan upaya menjaga inflasi pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen, memperkuat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan membangun transformasi sistem pangan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Data resmi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tahun 2025 tercatat 2,92 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, produksi padi meningkat menjadi 60,21 juta ton GKG, dan kemiskinan menurun menjadi 8,47 persen. Namun demikian, inflasi kelompok volatile food tetap relatif tinggi, harga grosir hasil pertanian masih berfluktuasi, dan rumah tangga miskin tetap sangat sensitif terhadap perubahan harga pangan. Makalah ini berargumen bahwa ketahanan pangan adalah prasyarat penting bagi stabilitas makro karena memengaruhi inflasi, konsumsi rumah tangga, kesejahteraan petani, perdagangan, dan efektivitas kebijakan publik. Oleh sebab itu, kebijakan ketahanan pangan Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi harus meliputi penguatan logistik, cadangan pangan, perlindungan sosial, integrasi data, diversifikasi pangan, dan tata kelola lintas sektor yang lebih kokoh. ([BPK Regulation](#))

Kata kunci: *ketahanan pangan, stabilitas ekonomi makro, inflasi pangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indonesia*

Ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia

Pendahuluan

Dalam pembicaraan ekonomi makro, perhatian sering tertuju pada inflasi, pertumbuhan, nilai tukar, suku bunga, defisit fiskal, dan neraca perdagangan. Namun dalam praktik pembangunan, seluruh variabel tersebut kerap bertemu pada satu arena yang sangat konkret, yaitu pangan. Kenaikan harga pangan dengan cepat dapat mendorong inflasi,

mengurangi daya beli, memperbesar kemiskinan, memicu tuntutan kenaikan upah, menekan konsumsi rumah tangga, dan pada akhirnya memperumit pengelolaan kebijakan moneter serta fiskal. Sebaliknya, sistem pangan yang stabil dapat menopang konsumsi, menurunkan ketidakpastian inflasi, menjaga ketenangan sosial, dan memberi ruang yang lebih sehat bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itulah ketahanan pangan harus dipahami sebagai variabel makroekonomi yang strategis, bukan sekadar isu sektoral. Pandangan ini sejalan dengan definisi hukum nasional tentang pangan dan dengan pendekatan food systems yang dikembangkan berbagai lembaga internasional. ([BPK Regulation](#))

Secara global, urgensi persoalan ini semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir. FAO menegaskan bahwa dunia memang menunjukkan sedikit perbaikan setelah periode krisis, tetapi pada 2024 masih terdapat sekitar 673 juta orang yang mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang menghadapi kerawanan pangan sedang atau berat, dan 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. FAO juga menekankan bahwa laporan SOFI 2025 memberi perhatian khusus pada inflasi pangan karena sejak 2020 laju kenaikan harga pangan secara konsisten lebih tinggi daripada inflasi umum, dengan puncak 13,6 persen pada Januari 2023, atau 5,1 poin persentase di atas inflasi umum 8,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pangan bukan hanya isu sosial, tetapi juga sumber utama tekanan ekonomi yang dapat memperlambat pemulihan kesejahteraan global. ([FAOHome](#))

Indonesia tidak berada di luar dinamika tersebut. Sebagai negara berpenduduk besar, negara kepulauan, dan ekonomi yang masih memiliki jutaan rumah tangga rentan, Indonesia harus mengelola ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi stabilitas nasional. Target inflasi 2025–2027 ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi 1 persen, dan inflasi aktual 2025 tercatat 2,92 persen. Namun Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa pada Februari 2026 inflasi tahunan mencapai 4,76 persen, walaupun BI menilai lonjakan ini dipengaruhi low base effect dan tetap meyakini inflasi akan kembali ke sasaran. Fakta ini menunjukkan bahwa stabilitas

harga—terutama harga pangan—selalu merupakan pekerjaan yang dinamis. Dalam konteks tersebut, pertanyaan mendasarnya ialah: sejauh mana ketahanan pangan menopang stabilitas makroekonomi Indonesia, dan kebijakan apa yang dibutuhkan agar hubungan itu semakin kuat? ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini membahas persoalan tersebut dalam kerangka akademik yang lebih luas. Pembahasan diawali dengan landasan konseptual ketahanan pangan dan stabilitas makroekonomi, lalu dilanjutkan dengan analisis hubungan antara pangan, inflasi, pertumbuhan, kemiskinan, perdagangan, serta kesejahteraan petani. Selanjutnya makalah membahas konteks Indonesia mutakhir berdasarkan data resmi BPS, Bank Indonesia, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional. Pada bagian akhir diajukan argumen bahwa ketahanan pangan harus dipandang sebagai fondasi stabilitas makro yang multidimensi: bukan hanya soal produksi beras, tetapi juga tentang logistik, daya beli, gizi, tata kelola, dan kapasitas negara dalam mengelola guncangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

1. Landasan Konseptual Ketahanan Pangan dan Stabilitas Makroekonomi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan fondasi penting bagi pembacaan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam undang-undang itu, ketahanan pangan bukan hanya ketersediaan barang, tetapi kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau sampai ke tingkat perseorangan agar warga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini sangat penting karena menempatkan keterjangkauan dan produktivitas manusia sebagai bagian dari ketahanan pangan itu sendiri. Dengan demikian, sejak awal kerangka nasional Indonesia sudah menegaskan bahwa pangan memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia, bukan hanya dimensi produksi. ([BPK Regulation](#))

Kerangka internasional memperluas pemahaman itu. OECD menegaskan bahwa food systems menghadapi tiga sasaran yang saling terkait:

menjamin ketahanan pangan dan gizi, menopang penghidupan para pelaku, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menghindarkan kita dari kesalahan lama yang melihat pangan semata sebagai hasil panen. Dalam praktiknya, produksi yang tinggi belum tentu menghasilkan ketahanan pangan bila distribusi tidak efisien, harga tidak terjangkau, atau kualitas diet menurun. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu fokus menekan harga konsumen juga dapat melemahkan insentif produsen bila tidak disertai peningkatan produktivitas. Dari sini terlihat bahwa pangan selalu berada di tengah trade-off kebijakan, dan karena itu ketahanan pangan harus dibaca sebagai persoalan sistem ekonomi yang kompleks. ([Bappenas Working Papers](#))

Stabilitas ekonomi makro sendiri secara umum merujuk pada keadaan ketika inflasi terkendali, pertumbuhan berjalan berkesinambungan, neraca eksternal relatif terjaga, serta sistem keuangan dan fiskal cukup kuat menahan guncangan. Dalam kerangka Bank Indonesia, inflasi yang rendah dan stabil bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. BI juga menekankan bahwa pencapaian sasaran inflasi memerlukan koordinasi lintas kementerian dan daerah karena inflasi Indonesia sangat peka terhadap shocks di sisi penawaran, termasuk pangan. Maka, bila pangan merupakan salah satu sumber tekanan utama pada sisi penawaran, ketahanan pangan otomatis menjadi bagian dari fondasi stabilitas makro. ([Bank Indonesia](#))

Dalam konteks Indonesia, hubungan konseptual tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Ketahanan pangan yang kuat membantu menekan volatilitas harga pangan. Harga pangan yang lebih stabil menjaga daya beli rumah tangga, terutama kelompok rentan. Daya beli yang terjaga menopang konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama PDB Indonesia. Pada saat yang sama, sistem pangan yang lebih efisien dan produktif dapat memperkuat pendapatan petani, mengurangi tekanan impor pada komoditas tertentu, dan membantu pemerintah mengendalikan kebutuhan intervensi darurat yang mahal. Dengan kata

lain, ketahanan pangan berfungsi sebagai jembatan antara stabilitas harga, pertumbuhan, distribusi kesejahteraan, dan efisiensi kebijakan publik.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. Mengapa Pangan Sangat Menentukan Stabilitas Ekonomi Makro

Pangan menentukan stabilitas makro pertama-tama melalui inflasi. Dalam struktur inflasi Indonesia, komponen volatile food memiliki peran sangat besar karena dipengaruhi panen, cuaca, distribusi, dan dinamika pasokan. Bank Indonesia mencatat bahwa inflasi IHK 2025 sebesar 2,92 persen tetap berada dalam sasaran, tetapi inflasi pada Desember 2025 terutama disumbang kelompok volatile food dan administered prices. BI juga melaporkan bahwa pada Februari 2026, inflasi tahunan mencapai 4,76 persen; walaupun faktor low base effect berperan, kelompok volatile food tetap mengalami inflasi 4,64 persen tahun-ke-tahun dan disumbang antara lain oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah akibat peningkatan permintaan dan penurunan pasokan karena cuaca. Ini memperlihatkan bahwa stabilitas pangan sangat menentukan apakah pengendalian inflasi makro dapat berjalan mulus atau tidak. ([Bank Indonesia](#))

Kedua, pangan menentukan stabilitas makro melalui daya beli dan konsumsi rumah tangga. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 masih 8,47 persen atau 23,85 juta orang. Rata-rata garis kemiskinan nasional tercatat Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp2.875.235 per bulan untuk rumah tangga miskin rata-rata dengan 4,72 anggota. Karena pengeluaran rumah tangga miskin didominasi oleh kebutuhan dasar, perubahan harga bahan makanan langsung memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi seperti Indonesia, ketika harga pangan naik, dampaknya tidak berhenti pada statistik inflasi; ia juga mengubah pola konsumsi, kualitas diet, dan stabilitas sosial rumah tangga rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, pangan memengaruhi stabilitas makro melalui sisi produksi dan kesejahteraan produsen. BPS melaporkan bahwa NTP nasional pada

Desember 2025 mencapai 125,35, naik 1,05 persen dari bulan sebelumnya, tetapi pada saat yang sama Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani naik 1,40 persen dan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Artinya, petani bukan hanya produsen pangan, tetapi juga konsumen yang terkena tekanan biaya hidup. Harga pangan yang terlalu rendah bisa merusak insentif produksi; harga yang terlalu tinggi membebani konsumen. Maka, stabilitas makro yang sehat tidak identik dengan harga pangan serendah mungkin, melainkan harga yang cukup stabil dan cukup adil bagi dua sisi pasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat, pangan memengaruhi perdagangan dan kerentanan eksternal. BPS mencatat bahwa sepanjang Januari–November 2025 nilai impor Indonesia mencapai US\$218,02 miliar, naik 2,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sementara neraca perdagangan masih surplus US\$38,54 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap terbuka dan sangat terhubung dengan pasar global. Dalam kondisi krisis pangan global atau kenaikan harga input, ketergantungan pada beberapa impor komoditas atau bahan baku tertentu dapat menjadi kanal transmisi guncangan dari luar negeri ke ekonomi domestik. Karena itu, penguatan ketahanan pangan domestik juga merupakan cara mengurangi kerentanan eksternal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kelima, pangan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, dan pada gilirannya dengan pertumbuhan jangka panjang. WHO menegaskan bahwa diet sehat melindungi dari semua bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular, serta kebiasaan diet yang dibentuk sejak masa kanak-kanak cenderung berlanjut hingga dewasa. Bila rumah tangga terus-menerus terpaksa memilih makanan murah tetapi miskin gizi akibat tekanan harga, maka dampaknya akan muncul pada kesehatan, produktivitas, dan kualitas belajar generasi muda. Di sinilah ketahanan pangan menjadi bagian dari stabilitas makro jangka panjang: tanpa gizi yang memadai, kualitas

pertumbuhan akan menurun meskipun output agregat masih naik.

([FAOHome](#))

3. Konteks Global: Pangan sebagai Sumber Risiko Makroekonomi

Dinamika global memperlihatkan bahwa pangan semakin menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi di banyak negara. FAO menegaskan bahwa sejak 2020 inflasi pangan konsisten melampaui inflasi umum. Pada Januari 2023, inflasi pangan global mencapai puncak 13,6 persen, lebih tinggi 5,1 poin persentase dari inflasi umum 8,5 persen. Setelah itu laju inflasi menurun, tetapi efek kumulatifnya besar: setelah lima tahun, harga pangan dunia naik lebih dari 35 persen, sementara rata-rata harga umum naik sekitar 25 persen. FAO juga menekankan bahwa negara berpendapatan rendah menanggung dampak paling berat karena rumah tangga di negara-negara itu membelanjakan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk makanan. ([FAOHome](#))

Dampak global itu tidak hanya terlihat dalam bentuk harga, tetapi juga dalam bentuk krisis kemanusiaan. WFP melalui Global Report on Food Crises 2025 mencatat bahwa pada 2024 lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan teritori mengalami acute levels of hunger, naik 13,7 juta dari tahun sebelumnya. Pendorong utamanya adalah konflik, guncangan ekonomi, ekstrem iklim, dan perpindahan paksa. Data ini memperlihatkan bahwa pangan dapat berubah dari isu ekonomi menjadi isu kemanusiaan dan keamanan dalam waktu relatif singkat. Bagi negara seperti Indonesia, pelajaran utamanya adalah bahwa ketahanan pangan domestik harus dibangun sebelum guncangan ekstrem datang, bukan sesudahnya. ([World Food Programme](#))

Pada saat yang sama, dunia menghadapi paradoks. Sejumlah harga komoditas internasional memang mulai menurun pada 2025, tetapi kemampuan membeli diet sehat tidak pulih secepat itu. FAO menyatakan bahwa pada 2024 masih ada 2,6 miliar orang yang tidak mampu membeli diet sehat. Ini menandakan bahwa masalah pangan global bukan hanya pada sisi komoditas, tetapi juga pada sisi pendapatan, distribusi, dan

transmisi harga ke rumah tangga. Secara makro, situasi ini penting karena berarti penurunan harga komoditas tidak otomatis memperbaiki kesejahteraan bila struktur pasar dan pendapatan masyarakat tetap rapuh. ([FAOHome](#))

World Bank juga mengingatkan bahwa perekonomian dunia pada 2025 memasuki fase yang lebih bergejolak. Dalam *Global Economic Prospects* Juni 2025, Bank Dunia memperingatkan bahwa tanpa koreksi kebijakan yang cepat, kerusakan pada living standards dapat menjadi serius, dan pertumbuhan global bisa turun ke 2,3 persen—kinerja terlemah dalam 17 tahun di luar periode resesi global. Dalam situasi seperti itu, pangan menjadi variabel yang amat penting, karena gejolak harga makanan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan dengan menekan konsumsi rumah tangga dan memaksa pemerintah memperbesar intervensi. Bagi ekonomi menengah seperti Indonesia, ketahanan pangan karena itu juga menjadi penyangga terhadap pelemahan global. ([The World Bank](#))

4. Kondisi Indonesia: Kemajuan dan Kerentanan

Secara agregat, kinerja makroekonomi Indonesia pada 2025 tergolong baik. BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD 5.083,4. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap ekspansif di tengah tekanan global. Namun, stabilitas makro yang kuat pada level agregat tidak boleh membuat pembacaan atas pangan menjadi terlalu optimistis, sebab tekanan harga pangan dan akses pangan rumah tangga tetap dapat hidup di balik angka pertumbuhan yang tampak sehat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi inflasi, keberhasilan juga tampak, tetapi dengan catatan. Target inflasi 2025, 2026, dan 2027 ditetapkan masing-masing 2,5 persen dengan deviasi 1 persen. Realisasi inflasi 2025 sebesar 2,92 persen menunjukkan sasaran tersebut tercapai. Akan tetapi, Bank Indonesia juga menunjukkan

bahwa inflasi Desember 2025 terutama didorong volatile food, dan pada Februari 2026 inflasi tahunan naik menjadi 4,76 persen. BI menilai lonjakan itu masih terkendali karena dipengaruhi low base effect dan memperkirakan inflasi akan menurun kembali, namun data ini tetap menegaskan bahwa komponen pangan merupakan sumber kerentanan makro yang harus terus dikelola. ([Bank Indonesia](#))

Dari sisi produksi, Indonesia menunjukkan modal penting untuk ketahanan. BPS melaporkan bahwa luas panen padi 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare, naik 12,69 persen dari 2024. Produksi padi dalam GKG mencapai 60,21 juta ton, naik 13,29 persen, dan produksi beras untuk konsumsi penduduk mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton dibanding 2024. Data ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis domestik yang kuat untuk komoditas pangan pokok utama. Dalam perspektif makroekonomi, peningkatan produksi seperti ini membantu menahan imported inflation dan memberi ruang lebih besar bagi stabilisasi harga domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, produktivitas dan pasokan nasional belum otomatis berarti stabilitas sempurna. BPS juga menunjukkan adanya kenaikan harga di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani. Pada Desember 2025, harga beras premium di penggilingan rata-rata Rp13.905 per kilogram, naik 2,62 persen dibanding bulan sebelumnya. Di waktu yang sama, IKRT petani juga naik 1,40 persen, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun produksi nasional membaik, stabilitas harga tetap dipengaruhi rantai distribusi, ekspektasi pasar, dan biaya hidup. Dengan kata lain, ketahanan pangan yang relevan bagi makroekonomi bukan sekadar produksi tinggi, tetapi produksi yang disertai efisiensi logistik dan stabilitas harga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada sisi sosial, Indonesia masih mempunyai kerentanan yang cukup besar. BPS mencatat kemiskinan Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau 23,85 juta orang. Rumah tangga miskin rata-rata hidup di bawah garis pengeluaran

sekitar Rp2,875 juta per bulan untuk 4,72 anggota rumah tangga. Dalam kondisi ini, gejolak harga pangan memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan. Bahkan bila pertumbuhan ekonomi tetap positif dan inflasi umum terkendali, kenaikan harga beras, telur, daging ayam, cabai, atau minyak goreng tetap dapat mengganggu keseimbangan hidup jutaan rumah tangga. Dari sinilah terlihat bahwa ketahanan pangan berfungsi sebagai jembatan antara capaian makro dan pengalaman hidup sehari-hari masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Saluran Pengaruh Ketahanan Pangan terhadap Stabilitas Makro Indonesia

5.1 Inflasi dan ekspektasi harga

Hubungan paling langsung antara ketahanan pangan dan stabilitas makro adalah melalui inflasi. Indonesia memiliki pengalaman panjang bahwa gejolak harga cabai, bawang, beras, telur, minyak goreng, dan daging ayam dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi. Ketika komoditas pangan pokok naik, rumah tangga merasakan tekanan lebih cepat daripada saat harga komoditas lain naik. BI menekankan pentingnya koordinasi pusat-daerah lewat TPIP dan TPID untuk mengatasi kerentanan inflasi yang bersumber dari pasokan. Ini berarti ketahanan pangan tidak hanya mengurangi kenaikan harga aktual, tetapi juga membantu menambatkan ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, ekspektasi tersebut sangat penting karena memengaruhi perilaku konsumsi, upah, dan keputusan bisnis. ([Bank Indonesia](#))

5.2 Konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan Indonesia. Ketika harga pangan stabil, rumah tangga dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih rasional dan mempertahankan pengeluaran nonpangan seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan jasa lain. Sebaliknya, saat harga pangan melonjak, belanja rumah tangga cenderung terserap untuk kebutuhan dasar, sehingga ruang konsumsi lain

menyempit. Dalam jangka pendek hal ini dapat menahan pertumbuhan permintaan domestik; dalam jangka panjang dapat mengurangi kualitas investasi rumah tangga dalam pendidikan dan kesehatan. Karena itu, ketahanan pangan sesungguhnya menopang pertumbuhan melalui stabilitas konsumsi. Data kemiskinan dan garis kemiskinan BPS memperkuat argumen ini: ketika ruang anggaran rumah tangga miskin sangat sempit, sedikit perubahan harga pangan dapat menghasilkan perubahan besar dalam pola konsumsi riil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.3 Kesejahteraan petani dan kapasitas produksi masa depan

Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut konsumen, tetapi juga produsen. Bila harga di tingkat produsen terlalu rendah atau terlalu bergejolak, petani kehilangan insentif untuk memproduksi dan berinvestasi. NTP 125,35 pada Desember 2025 menunjukkan situasi petani relatif membaik, tetapi kenaikan biaya hidup dan harga input tetap menjadi faktor penting. Dari sudut makro, melemahnya insentif produsen berarti risiko lebih besar terhadap pasokan masa depan. Negara kemudian harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk intervensi, impor, atau subsidi. Maka, stabilitas makro yang baik memerlukan keseimbangan: harga harus cukup terjangkau bagi konsumen, tetapi cukup memberikan imbal hasil bagi petani. Inilah salah satu alasan mengapa stabilitas pangan lebih penting daripada sekadar harga rendah sesaat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.4 Neraca perdagangan dan kerentanan eksternal

Bila produksi pangan domestik kuat, kebutuhan impor pada komoditas tertentu dapat ditekan, atau setidaknya volatilitas impor menjadi lebih kecil. Hal ini membantu neraca perdagangan dan mengurangi tekanan pada nilai tukar. Surplus perdagangan Indonesia selama Januari–November 2025 mencapai US\$38,54 miliar, tetapi impor tetap besar, yakni US\$218,02 miliar. Dalam konteks ini, ketahanan pangan domestik dapat dipandang sebagai salah satu instrumen mengurangi ketergantungan pada pasar internasional yang fluktuatif, terutama saat dunia mengalami shock harga

pangan, energi, atau logistik. Bukan berarti semua impor harus dihapus, tetapi basis produksi domestik yang kuat memberi ruang kebijakan yang lebih besar bagi otoritas makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.5 Fiskal, perlindungan sosial, dan biaya intervensi negara

Ketika harga pangan naik tajam, pemerintah biasanya didorong untuk menyalurkan bantuan pangan, memperbesar operasi pasar, menambah subsidi tertentu, atau memperluas program perlindungan sosial. Intervensi ini sering diperlukan, tetapi juga memiliki biaya fiskal. Karena itu, sistem pangan yang tangguh dapat mengurangi frekuensi dan skala intervensi darurat yang mahal. Badan Pangan Nasional menetapkan target Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 dengan penyerapan beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, dan minyak goreng 790 ribu ton. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang cadangan pangan sebagai instrumen penyangga makro dan sosial sekaligus. Dalam perspektif fiskal, cadangan seperti itu adalah biaya pencegahan agar biaya krisis tidak jauh lebih besar. ([Badan Pangan Nasional](#))

5.6 Gizi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas

Hubungan terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah hubungan antara pangan dan produktivitas jangka panjang. Ketika diet sehat tidak terjangkau, rumah tangga cenderung menukar mutu gizi dengan harga murah. FAO menunjukkan bahwa 2,6 miliar orang di dunia belum mampu membeli diet sehat, sedangkan WHO menegaskan pentingnya pola makan sehat bagi pencegahan malnutrisi dan penyakit tidak menular. Bagi Indonesia, ini berarti kebijakan ketahanan pangan harus bergerak dari sekadar "cukup makan" ke "cukup makan dengan kualitas yang sehat." Tanpa hal itu, ekonomi dapat tumbuh secara kuantitatif tetapi kualitas tenaga kerja dan kesehatan masyarakat akan tertinggal. Dalam jangka panjang, kelemahan tersebut dapat mengurangi produktivitas dan menekan pertumbuhan potensial. ([FAOHome](#))

6. Kebijakan Indonesia: Arah yang Sudah Benar, Tantangan yang Masih Besar

Bappenas pada akhir 2024 menegaskan bahwa salah satu prioritas utama RPJMN 2025–2029 adalah transformasi sistem pangan yang menekankan kemandirian pangan melalui inovasi teknologi pertanian, penguatan koperasi produksi, dan keberlanjutan. Arah ini penting karena menunjukkan pergeseran dari pendekatan sempit yang hanya melihat volume produksi ke pendekatan sistemik yang mencakup pengelolaan komoditas prioritas, distribusi, dan kualitas pembangunan pangan. Bappenas juga menegaskan kerja sama dengan IFPRI dan FAO untuk memperkuat strategi ketahanan pangan serta transformasi sistem pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memahami pangan sebagai agenda pembangunan lintas sektor, bukan sekadar agenda tahunan stabilisasi harga. ([Bappenas](#))

Bank Indonesia, di sisi lain, memosisikan ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Dalam siaran 6 Januari 2026 BI secara eksplisit menyebut bahwa inflasi 2025 yang berada dalam sasaran ditopang konsistensi kebijakan moneter, sinergi pemerintah pusat-daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Pada 30 Januari 2026 pemerintah dan BI kembali menegaskan sinergi untuk menjaga inflasi 2026, termasuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan komunikasi kebijakan, dan dukungan untuk daya beli. Dari sini terlihat bahwa dalam praktik kebijakan, pangan memang telah menjadi bagian dari orkestrasi makroekonomi. ([Bank Indonesia](#))

Namun tantangan tetap besar. Pertama, struktur pangan Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada beberapa komoditas impor dan pada input pertanian tertentu. Kedua, distribusi antarwilayah dalam negara kepulauan masih menjadi sumber disparitas harga. Ketiga, perubahan iklim membuat volatilitas panen dan pasokan semakin sulit diprediksi. Keempat, keberhasilan produksi belum selalu diterjemahkan menjadi diet sehat yang terjangkau. Kelima, data pangan lintas lembaga masih perlu terus diperkuat

agar pengambilan keputusan lebih presisi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi sistem pangan Indonesia memang harus bergerak lebih cepat bila ingin memberi kontribusi maksimal pada stabilitas makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara konseptual, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, tetapi pekerjaan utama ada pada eksekusi. Sebuah negara bisa mempunyai target inflasi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan produksi pangan yang naik, tetapi bila logistik lemah, cadangan tidak gesit, koordinasi pusat-daerah terfragmentasi, dan rumah tangga miskin tidak cukup terlindungi, maka stabilitas makro tetap rapuh. Karena itu, ketahanan pangan harus dipahami sebagai kemampuan sistem untuk mencegah guncangan berubah menjadi krisis, bukan sekadar kemampuan menghasilkan output tinggi pada tahun yang baik. ([Bank Indonesia](#))

7. Agenda Penguatan Ketahanan Pangan untuk Stabilitas Makro Indonesia

Pertama, Indonesia perlu terus menguatkan produksi domestik yang efisien dan tahan iklim. Kenaikan produksi padi 2025 memberi sinyal bahwa penguatan basis domestik tetap sangat relevan. Namun produktivitas tidak boleh dibaca semata sebagai perluasan luas panen; ia harus mencakup teknologi budidaya, pengelolaan air, varietas tahan cekaman, pengurangan kehilangan pascapanen, dan manajemen risiko iklim. Dengan begitu, output dapat bertahan lebih stabil, dan volatilitas harga dapat ditekan tanpa harus bergantung berlebihan pada intervensi setelah krisis terjadi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, logistik pangan dan integrasi pasar domestik harus dipandang sebagai agenda makroekonomi. Dalam negara kepulauan, sering kali masalah utama bukan ketiadaan nasional, melainkan keterlambatan aliran pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. Karena itu, perbaikan jalan, pelabuhan, pergudangan, cold chain, data stok, dan fasilitasi distribusi bukan hanya proyek infrastruktur; semuanya adalah instrumen pengendalian inflasi dan penguatan daya beli. Bila pasar domestik lebih

terintegrasi, guncangan lokal lebih mudah diredam sebelum berubah menjadi lonjakan harga nasional. ([Bank Indonesia](#))

Ketiga, cadangan pangan dan instrumen intervensi pasar harus dikelola secara profesional, adaptif, dan transparan. Target CPP 2026 yang cukup besar menunjukkan komitmen pemerintah, tetapi efektivitasnya bergantung pada kecepatan penyaluran, akurasi data, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pelaku pasar. Cadangan pangan yang baik akan berfungsi sebagai penstabil pasokan, penenang ekspektasi, dan pengaman bagi rumah tangga rentan. Sebaliknya, cadangan yang besar tetapi tidak responsif hanya menjadi angka administratif tanpa kekuatan makro yang nyata. ([Badan Pangan Nasional](#))

Keempat, perlindungan sosial perlu diselaraskan lebih erat dengan dinamika harga pangan. BPS menunjukkan bahwa kelompok rentan masih besar, dan FAO menekankan bahwa inflasi pangan paling merusak kelompok berpendapatan rendah. Itu berarti bantuan pangan, bantuan tunai, atau intervensi lain harus cukup fleksibel untuk merespons shock harga. Dalam perspektif makro, perlindungan sosial semacam itu membantu menjaga konsumsi dasar, mencegah lonjakan kemiskinan, dan menurunkan risiko ketegangan sosial saat terjadi gejolak. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kelima, kebijakan pangan harus semakin berorientasi gizi. Bila tujuan makro Indonesia bukan sekadar tumbuh, tetapi tumbuh dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, maka pangan yang dijaga keterjangkauannya haruslah pangan yang juga sehat dan aman. Di sinilah diversifikasi pangan, penguatan protein, hortikultura, dan edukasi konsumsi menjadi relevan. Stabilitas harga yang hanya mempertahankan kalori murah mungkin tampak sukses dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk membangun produktivitas jangka panjang. ([FAOHome](#))

Keenam, tata kelola data pangan harus diperkuat. Pengambilan keputusan makro yang baik memerlukan data tentang produksi, stok, harga, distribusi, konsumsi, kemiskinan, dan gizi yang saling terhubung. Tanpa itu, kebijakan

sering menjadi reaktif dan terlambat. Penguatan data akan membantu pemerintah membedakan gejolak musiman biasa dari tekanan struktural, sehingga respons kebijakan menjadi lebih tepat, lebih hemat, dan lebih kredibel. Kredibilitas seperti itu penting dalam pengelolaan ekspektasi inflasi dan kepercayaan publik. ([Bank Indonesia](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi terpenting bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia. Hubungan antara keduanya bekerja melalui banyak jalur: inflasi, konsumsi rumah tangga, kesejahteraan petani, perdagangan, fiskal, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks global, tekanan pangan tetap tinggi meskipun beberapa harga komoditas telah melunak. FAO menunjukkan bahwa kelaparan, kerawanan pangan, dan ketidakmampuan membeli diet sehat masih besar, sementara inflasi pangan global dalam beberapa tahun terakhir meninggalkan jejak yang dalam. Keadaan ini menjadi pengingat bahwa pangan adalah salah satu titik paling rawan dalam perekonomian modern. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, capaian makro 2025 cukup kuat: ekonomi tumbuh 5,11 persen, inflasi 2025 berada dalam sasaran, dan produksi padi meningkat tajam. Tetapi capaian ini tidak menghapus kerentanan pada sisi pangan. Inflasi volatile food masih relatif tinggi, biaya hidup kelompok rentan tetap sensitif terhadap bahan makanan, dan kesejahteraan petani masih dipengaruhi fluktuasi harga serta biaya konsumsi. Karena itu, stabilitas makro Indonesia tidak boleh hanya dibaca dari angka agregat; ia juga harus dibaca dari apakah rumah tangga dapat membeli pangan yang layak dan apakah produsen memperoleh insentif yang cukup untuk terus memproduksi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kesimpulan utama makalah ini adalah bahwa ketahanan pangan bukan sekadar salah satu sektor pembangunan, melainkan infrastruktur ekonomi makro itu sendiri. Negara yang berhasil menjaga pangan tetap tersedia, terjangkau, bergizi, dan cukup stabil akan memiliki inflasi yang lebih

terkendali, konsumsi yang lebih kokoh, sosial yang lebih tenang, dan ruang kebijakan yang lebih luas. Sebaliknya, negara yang mengabaikan pangan akan terus menghadapi tekanan makro yang berulang. Karena itu, agenda ke depan bagi Indonesia haruslah membangun sistem pangan yang lebih produktif, lebih efisien, lebih inklusif, lebih sehat, dan lebih tangguh terhadap guncangan. Dalam bahasa sederhana, stabilitas ekonomi makro Indonesia pada akhirnya juga ditentukan oleh apakah meja makan rakyat tetap aman. ([BPK Regulation](#))

Glosarium

Ketahanan pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. ([BPK Regulation](#))

Stabilitas ekonomi makro

Keadaan ketika inflasi relatif terkendali, pertumbuhan berkesinambungan, serta kondisi fiskal, eksternal, dan sistem ekonomi cukup kuat menghadapi guncangan. Dalam konteks Indonesia, inflasi rendah dan stabil dipandang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi volatile food

Komponen inflasi yang terutama berasal dari bahan pangan bergejolak dan sangat dipengaruhi panen, cuaca, permintaan musiman, serta distribusi. ([Bank Indonesia](#))

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Persediaan pangan yang dikelola pemerintah untuk menopang intervensi

pasar dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. ([Badan Pangan Nasional](#))

NTP (Nilai Tukar Petani)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, yang digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan relatif petani. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Diet sehat

Pola konsumsi pangan yang cukup, aman, beragam, dan seimbang, yang melindungi dari berbagai bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular. ([FAOHome](#))

TPIP/TPID

Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, forum koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Food systems

Keseluruhan sistem yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, penghidupan para pelaku, dan dimensi keberlanjutan lingkungan dalam penyediaan pangan. ([Bappenas Working Papers](#))

Daftar Pustaka

Badan Pangan Nasional. (2026, January 12). *Ini strategi Bapanas di 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan.*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, December 5). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan.*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, February 19). *Perkuat strategi ketahanan pangan dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas jalin kolaborasi bersama IFPRI.*

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, August 20). *Bappenas dan FAO perkuat kolaborasi transformasi sistem pangan.*

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Neraca perdagangan Indonesia berlanjut surplus.*

Bank Indonesia. (n.d.). *Target inflasi.*

Bank Indonesia. (n.d.). *Inflasi.*

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran.*

Bank Indonesia. (2026, March 2). *Inflasi IHK Februari 2026 tetap terkendali.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 22). *Low-income countries hit hardest by global food price inflation.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *SOFI 2025: FAO calls for urgent, coordinated and inclusive action to end global hunger.*

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Komoditas strategis dan hilirisasi pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025–2029*. Bappenas Working Papers.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- World Bank. (2025). *Global economic prospects: June 2025*.
- World Food Programme. (2025). *Global Report on Food Crises 2025*.
- World Health Organization. (2026, January 26). *Healthy diet*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991))
<https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991>